**AKSELERASI PROSES DEMOKRATISASI : KAJIAN SOSILOGIS**

**Oleh : Christine Diah Wahyuningsih**

**NIDN : 0628015701**

***ABSTRACT***

The word democracy is increasingly popular in various developing countries, both at the level of discourse and the level of the social and political movements. As a political system, democracy has topped many countries because it is considered capable of regulating and resolving social and political relations, both involving interests between individuals in society, relations between communities, society and countries and between countries in the world. The collapse of communism in 1989 became an important momentum for democracy as a political system to spread its influence throughout the world. As a concept, democracy has a broad meaning with its own complexity. This paper tries to explain the variance of democracy, especially the debate between liberal democracies and social democracy. Besides that, he also tried to explain the practice of democracy in Indonesia after the 1998 reform era and showed the problems faced by this country in creating a democratic society. Finally this paper wants to explain that democratization in Indonesia is still in process and there are still many things that need to be addressed.

Keywords: democratization, liberals, social, acceleration, Indonesia

**Pendahuluan**

Sebagai suatu sistem politik suatu negara, demokrasi telah menempati urutan teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia. Setelah Ideologi komunisme Uni Soviet yang runtuh tahun 1989, setidaknya telah menjadi momentum penting bagi perluasan demokrasi sebagai wacana pilihan sistem politik. Popularitas Kepopuleran demokrasi sebagai ideologi politik secara cepat menyebar oleh berkembangnya wacana kritis yang sebagian besar mengungkapkan kegagalan praktek otoritarianisme. Hadirnya demokrasi seakan telah menjadi hal berarti dan nyata mengatasi masalah sosial politik yang selama ini diderita berbagai negara.

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks sebagai metode dan mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Jadi dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara. Namun demikian, proses kompetisi itu harus tetap dibingkai oleh etika normatif yang mengarah pada terjadinya equlibrium sosial.

Dalam demokrasi kesantunan politik harus tetap dijaga, sehingga konsep liberalisasi yang melekat pada ideologi demokrasi musti diartikan sebagai sebuah masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu masyarakat yang memiliki aturan main yang jelas sehingga si kuat tidak menindas si lemah. Ini dapat terjadi kalau ada hukum yang mengatur segala bentuk permainan, baik politik, ekonomi, dan kebudayaan. Aturan main itu hendaknya menjamin pemberian ruang gerak atau kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk melakukan aktifitas kehidupannya. Aturan main yang sudah dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk hukum tersebut seyogyanya dihormati oleh setiap aktor sosial dalam segala tingkat dan kapasitas.

Dengan kata lain, baik itu penguasa, pemerintah, pengusaha dan rakyat kebanyakan semuanya harus hormat dan tunduk pada hukum (aturan main). Barang siapa yang menyimpang dari aturan main atau barang siapa yang mencoba memanipulasi aturan main dapat ditindak melalui lembaga peradilan tanpa pandang bulu. Kalau kesadaran akan logika demokasi seperti itu sudah melembaga dan diinternalilasi oleh individu setiap anggota masyarakat, maka liberalisme sebagai roh demokrasi justru akan mendatangkan harmoni dan kemajuan peradaban. Kebebasan berusaha , kebebasan bersaing, kebebasan bersuara dan kebebasan memilih afiliasi politik justru tidak akan mendatangkan kekacauan tetapi kesejahteraan sosial. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa kemajuan masyarakat terjadi kalau semua aktor sosial sadar akan aturan main tersebut. Seandainya salah satu pihak melanggar aturan main dalam praktek politik khususnya penunjang kekuasaan maka konsep liberalisme akan tereduksi dalam faham Darwinisme Dalam faham Darwinisme tersebut konsep liberalisme dimaknai sebagai kebebasan yang tanpa batas, barang siapa yang kuat maka dialah yang akan eksis atau *survival of the fittest*. Dalam faham ini orang boleh ngomong semaunya sendiri, partai boleh melakukan demagogi hingga kapasitas maksimum, kekuatan politik boleh bertindak apa saja.

Dalam keadaan yang demikian yang muncul bukan equilibrium sosial tapi kondisi yang chaos. Dalam konteks masyarakat yang sedang membangun dan memberdayakan rakyatnya bukan konsep liberalisme dalam pengertian Darwin ini yang perlu di introdusir, namun pengertian liberalisme dalam bingkai kesantunan dan kemaslahatan yang harus diadopsi dan dipelajari. Dengan suasana liberalisasi yang kondusif ini maka negara akan dapat menjalankan ideologi demokrasinya secara lebih tertata dan konstruktif. Negara demokrasi ini akan dapat mengambil keputusan-keputusan dasar pemerintahannya yang tergantung sepenuhnya pada persetujuan bebas dari yang diperintah. Keterbukaan akan kritik juga merupakan syarat dari negara tipe ini, sehingga aspirasi masyarakat lapis bawah dapat mencuat ke permukaan dan digunakan sebagai landasan kebijakan pemerintah demi kemakmuran nasional. Institusi politik yang liberal merupakan syarat mutlak dari negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokratis. Liberalisasi atau demokratisasi merupakan dua hal yang secara total hidup dan berkembang di masyarakat. Demokrasi tidak dapat berjalan *in vacuum*, maksudnya demokrasi tidak dapat terjadi hanya pada sektor kehidupan politik saja, sementara sektor-sektor kehidupan lainnya tidak demokratis.

Jadi dalam ideologi demokrasi responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya secara politis harus menjadi dasar pijakannya, oleh karena itu maka negara memiliki kewajiban dalam memberikan peluang dan kesempatan bagi warganya untuk: a). Mampu merumuskan preferensinya, b). Mampu menunjukkan preferensinya pada warga negara dan pemerintah melalui tindakan pribadi dan kolektif, c). memberikan bobot yang sama pada preferensinya yang dilakukan oleh warga negara lain. Kesempatan yang harus dimiliki oleh semua warga negara tersebut di atas, akan dapat berjalan secara optimal apabila ada sejumlah jaminan kelembagaan, yaitu :

1. Kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi,
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat,
3. Hak memilih,
4. Kesempatan menjadi pejabat pemerintah,
5. Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan,
6. Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih suara,
7. Sumber-sumber informasi alternatif,
8. Lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung kepada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya

Kedelapan kondisi itu adalah merupakan elemen dasar bagi berlangsungnya iklim demokrasi yang sehat. Secara singkat kedelapan elemen dasar demokrasi itu dapat diringkas dalam tiga dimensi yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan politik. Ketika demokrasi diartikan sebagai kompetisi, partisipasi dan kebebasan maka proses demokratisasi (perubahan sistem politik dari bentuk non demokratis ke bentuk yang lebih demokratis), dapat dilakukan dengan dua jalan yang paling esensial yaitu jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi. Meningkatnya partisipasi (atau inklusifitas) berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Rezim non-demokratis mungkin saja menjauhkan sebagian besar masyarakatnya dari partisipasi. Pada rezim demokratis, seluruh penduduk dewasa memperoleh hak kebebasan secara penuh. Kompetisi (atau liberalisasi) menyangkut tersedianya hak-hak dan kebebasan, paling tidak bagi beberapa anggota sistem politik. Meningkatnya liberalisasi berarti meningkatnya peluang bagi oposisi politik dan meningkatnya kompetisi untuk meraih kekuasaan pemerintahan. Dengan adanya tiga dimensi demokrasi yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan di suatu negara maka akan lebih membuka peluang bagi berseminya proses demokratisasi. Terciptanya iklim demokratis yang optimal akan berdampak pada semakin menguatnya hak-hak warga negara dalam mengekspresikan aspirasinya. Hak-hak warga yang harus diperjuangkan dan diakomodasi dalam sistem politik yang demokratis adalah:

1. Perjuangan untuk mendapatkan otoritas bagi parlemen terpilih untuk mengambil keputusan/kebijakan,
2. Perjuangan untuk memperoleh perluasan atas hak memilih,
3. Perjuangan untuk membuat subyek penguasa berhubungan dengan kehendak para pemilih,
4. Perjuangan untuk mengadakan pemilu berdasarkan perhitungan yang jujur,
5. Perjuangan bagi diterimanya partai-partai politik yang terorganisir sebagai aktor sosial yang memiliki legitimasi dan sebagai peserta pemilu,
6. Perjuangan bagi terciptanya emansipasi bagi sekelompok masyarakat yang secara personal masih bergantung pada kelompok dominan agar mereka juga memiliki hak memilih pemerintah mereka.

Apabila suatu negara dapat menegakkan pilar demokrasi secara stabil dan kuat, maka bukan suatu hal yang mustahil bagi negara itu untuk merealisasikan kondisi yang menjadi parameter berlangsungnya sistem politik yang bercorak poliarki. Adapun parameter yang harus dimiliki pemerintahan yang bersifat poliarki adalah: a. Pemimpinnya tidak menggunakan kursi kekerasan melalui polisi dan militer untuk meraih atau mempertahankan kekuasaannya, b. adanya organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis, c. potensi konflik dalam pluralisme struktural dipertahankan pada tingkat yang masih dapat ditoleransi, d. dalam masyarakat yang aktif dalam politik berkembang budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi dan lembaga poliarki. Jadi praksis demokrasi yang paling substansial adalah negara wajib melindungi rakyat, utamanya dalam merepresentasikan hak-hak kewargaan mereka, lebih utama lagi dalam menyelenggarakan terciptanya hak-hak dasar hidup yang layak. Untuk itu maka negara berkewajiban mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan yang asosial. Negara juga harus mampu mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan negara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum bagi negara yang demokratis kebijakan negara adalah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga. Dukungan dari warga akan diperoleh manakala anggota warga merasa kehendak dan kepentingannya mendapat saluran yang wajar. Agar tidak terjadi penyimpangan demokrasi maka yang diperlukan adalah penegasan perlunya keseimbangan yang kuat di antara elemen- elemen negara untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat secaraefektif terlayani melalui sarana dan perlengkapan pemerintah. Untuk itu maka harus ada penguatan paradigma di kalangan rakyat ke arah *high trust society* yaitu masyarakat yang memiliki kepercayaan dan rasa hormat akan kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Dalam masyarakat yang rendah tingkat kepercayaannya kepada pemerintahannya akan sangat sulit membangun dan membangkitkan partisipasi. Kondisi ini tentu saja akan menjadi batu sandungan bagi penguatan iklim demokrasi di sebuah negara . Kontrol atas kekuasaan sebuah negara dalam menjalankan sistem pemerintahannya agar tidak berlaku totaliter dilakukan oleh rakyat. Dengan kontrol ini maka ketertiban bersama, kesejahteraan umum dan hak-hak individu rakyat akan tetap terjaga. Oleh karena itu wewenang negara demokrasi adalah terbatas, yaitu sejauh mandat yang diberikan rakyat melalui pemilu dan sejauh praksis pencapaian kesejahteraan bersama menjadi tujuannya.

Dengan demikian jelas bahwa di satu pihak sistem negara demokratis membutuhkan penataan kelembagaan sebagai mekanisme pembagian kekuasaan demi kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak bila mekanisme kelembagaan sudah dibuat dan terus berproses, tidak otomatis bisa dikatakan demokrasi telah berjalan optimal. Demokrasi baru dapat dikatakan berhasil apabila tujuan *society* (masyarakat) mendirikan *state* (negara) telah dicapai. Tujuan yang harus diupayakan terwujudnya adalah adanya kesejahteraan masyarakat, yang secara hukum berarti terjaminnya hak hidup dan martabat masing- masing warga negara di negara tersebut.

**Demokrasi Liberal Dan Demokrasi Sosial Dalam Masyarakat**

Dalam lingkup global terdapat dua tipe demokrasi yang bertarung memperebutkan dominasi politik dan spirit, yaitu demokrasi libertarian dan sosial. Keduanya mengaku strategi tepat untuk menyelenggarakan kebebasan dan keadilan lembaga dan memberikan pemahaman yang berbeda tentang konsep kebebasan dan keadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Konsep demokrasi libertarian dikelompokkan berdasar kenyataan bahwa negara pemerintah meskipun merupakan bagian dari struktur demokratis dalam koridor undang-undang, namun sebagian besar kondisi sosial ekonomi tetap dianggap sebagai wilayah pribadi yang lepas dari campur tangan dan struktur politik. Tuntuan atas keseluruhan tanggung-jawab pemerintah untuk membentuk struktur sosial, mengatur perekonomian dan menjalankan kebijakan untuk melaksanakan nilai dasar kebebasan dan keadilan bagi pihak yang mampu, akan dianggap sebagai sebuah invasi tidak sah oleh negara ke dalam wilayah pribadi kebebasan warga negara. Kebebasan demokratis dan hak-hak warga negara dalam bidang politik, sosial dan ekonomi adalah suatu hal yang tidak boleh dikendalikan oleh pemerintah dan idealnya justru memberikan peluang terjadinya otonomi swasta, kontak yang dilakukan sendiri pihak swasta serta pasar yang mengatur dirinya sendiri.

Dalam kehidupan sosial ekonomi, hasilnya adalah kesenjangan besar dan sering terus berkembang dalam kesempatan dan pilihan bagi kelas masyarakat berbeda. Sebagian besar masyarakat akan tersisihkan dan kemudian tidak memiliki barang sosial untuk hidup layak. Sebagian besar populasi akan terjerat ketergantungan kebutuhan ekonomi dan sosial serta berdampak kepada tersisihnya dari dinamika kehidupan masyarakat, sosial, dan budaya secara layak. Ketergantungan ekonomi dan kebutuhan sebagian besar anggota masyarakat ini berujung pada hilangnya kesempatan dan peluang mereka untuk menggunakan hak sipilnya secara demokratis.

Berdasarkan kenyataan ini lahir tipe demokrasi defektif yang menyangkal dan mengerosi hak kewarganegaraan berupa hak sipil dan politik. Oleh sebab itu demokrasi libertarian dianggap akan cenderung menjadi sebuah tipe demokrasi elit atau delegatif. Tipe demokrasi ini akan membatasi kesempatan partisipasi demokrasi yang penuh pada sebagian besar anggota masyarakat dan hanya akan memberi kesempatan pada sekelompok kecil masyarakat. Ketika demokrasi liberal membawa kekurangan dan kontradiksi dalam praktek pelaksanaannya kemudian sebagian besar negara Eropa menerapkan praktek demokrasi sosial sebagai upaya perbaikan terhadap praktek demokrasi liberal yang banyak akses negatifnya. Landasan utama konsep demokrasi sosial modern adalah konvensi hak-hak dasar PBB tahun 1966, sebagai dokumen yang sah dari hak internasional yang melindungi lima hak asasi manusia yaitu hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Ide dasar dibalik lima dimensi konsep hak asasi tersebut pada dasarnya adalah jaminan terciptanya peluang bagi setiap individu warga negara untuk memperoleh kebebasan dan kesempatan pengembangan personal serta membuka peluang adanya ruang bagi setiap individu untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosialnya. Semua haruslah dijamin tanpa memandang status sosial, ekonomi, latar belakang etnis, agama, budaya, dll. Konvensi perlindungan lima hak asasi manusia yang merupakan pondasi bagi terwujudnya demokrasi sosial ini diratifikasi oleh 148 negara dengan aneka latar belakang budaya dan tingkat sosial ekonomi. Suatu negara yang menjalankan konsepsi demokrasi sosial dituntut untuk menawarkan perlindungan sosial pada warganya dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi. Negara juga harus mampu memberikan jaminan pada warganya supaya berkesempatan memperoleh dan menikmati fasilitas pendidikan yang memadai. Warga masyarakat tidak hanya sekedar dimungkinkan memperoleh ketrampilan, tetapi juga diarahkan agar dapat turut ambil bagian dalam dinamika kehidupan kebudayaan yang lebih luas. Bagi negara yang menjalankan konsep demokrasi sosial harus dapat menjaga harkat dan martabat warganya dalam konteks ekonomi dan sosial. Oleh karena itu negara wajib dapat mengelola dan mengendalikan dominasi iklim kapitalis agar tetap berjalan pada koridor yang tidak merugikan warga dan membuka dan memberdayakan ruang publik secara optimal sebagai instrumen warga dalam menyalurkan aspirasinya

Konsep demokrasi sosial menuntut setiap negara yang mempraktekkannya agar selalu memiliki jaminan sosial atas warganya secara menyeluruh. Jaminan sosial itu harus mampu memberikan perlindungan atas hak-hak demokrasi sosial. Namun demikian keberhasilan pelaksanaan demokrasi sosial pada suatu negara tidak semata- mata hanya ditangan pemerintahan, tetapi warga negara juga memiliki kewajiban tertentu yang dapat melengkapi hak-hak dasar mereka. Warga negara tidak semata-mata menunggu untuk menerima hak kewarganegaraan sosialnya, namun juga memiliki peran secara aktif dalam memikul tanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Setiap warganegara berkewajiban untuk meminta bantuan hanya ketika usahanya sendiri yang telah dikelola secara serius untuk memperoleh penghasilan sendiri tidak berhasil.

Dalam praktek demokrasi sosial, setiap pemerintahan dituntut memiliki komitmen untuk menjamin adanya kesetaraan kesempatan dan keadilan bagi setiap warganya. tidak hanya dalam bidang politik semata, tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi. Negara harus memberi jaminan atas ketersediaan kesempatan dasar dalam kehidupan warga. Agar dapat melakukan itu semua, negara harus memiliki jaminan berupa kepastian hukum dalam bentuk undang-undang, sehingga negara benar-benar dapat memberikan jaminan kesejahtaraan berbasis hak bagi warganya. Hal ini merupakan tanggung jawab politik suatu negara demokratis yang dapat mengakomodasi kebutuhan warganya.

**Akselerasi (Percepatan) Proses Demokratisasi**

Agar terjadi percepatan proses demokratisasi di suatu negara membutuhkan suatu kondisi yang kondusif. Pra kondisi bagi terciptanya akselerasi demokratisasi suatu negara, faktor ekonomi merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya proses demokratisasi di suatu negara. Masyarakat industri modern yang diasumsikan memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang tinggi akan lebih mudah menciptakan suatu negara yang demokratis. Asumsi ini didukung kenyataan bahwa modernisasi dan kesejahteraan akan selalu disertai dengan sejumlah faktor yang kondusif bagi demokrasi yaitu meningkatnya tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan pembangunan media massa.

Asumsi lain mengatakan bahwa akselerasi demokratisasi di suatu negara disebabkan oleh prakondisi yang berupa budaya politik dari suatu bangsa, karena sistem nilai dan keyakinan akan menjelaskan konteks dan makna dari tindakan politik. Namun demikian memang diakui oleh banyak ahli bahwa sulit untuk melihat suatu hubungan yang sistematis dan pasti antara pola budaya tertentu dan privalensi demokrasi, ada hal-hal yang bersifat relatif. Sistem budaya merupakan subyek perubahan yang bersifat dinamis. Hal ini nampak pada ideologi Katolisisme, pada satu kurun waktu tertentu dalam perjalanan sejarah, ideologi ini menghambat demokrasi di Amerika Latin, tetapi pada sisi lain gereja Katolik juga memainkan peranan penting dan aktif dalam oposisinya terhadap pemerintah otoriter di tahun 1980-an. Demikian juga dengan ideologi Islam, di beberapa negara di Timur Tengah ideologi ini mungkin menghambat proses demokratisasi, namun di Indonesia pada masa reformasi ini, kelompok- kelompok partai yang berspesifikasi pada ideologi Islam sangat mendukung pada terjadinya proses demokratisasi yang sedang berlangsung dengan marak di Indonesia.

Prakondisi lain yang dianggap dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi tegaknya iklim demokrasi di suatu negara adalah struktur sosial masyarakat, erpa faktor-faktor internal yang berupa sistem pelapisan sosial yang ada di masyarakat. Artinya kelas sosial tertentu akan memberikan dukungan yang signifikan bagi terjadinya proses demokratisasi namun kelas sosial yang lain justru menentangnya. Pada struktur kelas yang dianggap mendukung proses demokratisasi itu pada situasi dan kondisi lain yang berbeda ternyata adakalanya justru menjadi faktor penghambat terjadinya proses demokratisasi, demikian pula sebaliknya. Kelas yang selama ini diposisikan sebagai faktor penghambat proses demokratisasi pada situasi dan kondisi yang berbeda mereka justru memberikan dukungan yang besar bagi terciptanya iklim demokrasi.

Faktor lain yang dapat dijadikan modal bagi berlangsungnya iklim demokratis suatu masyarakat adalah faktor eksternal. Kondisi ekonomi politik, ideologi dan elemen lain dalam skala global akan mempengaruhi praktek demokrasi di suatu negara. Menurut beberapa kalangan faktor eksternal itu akan sangat mempengaruhi tingkat akselerasi kesadaran masyarakat khususnya di negara-negara berkembang, akan pentingnya penerapan ideologi demokrasi dalam sistem politiknya. Pengamat modernisasi berpendapat bahwa faktor-faktor eksternal itu akan mempengaruhi bagi upaya pengembangan dan penguatan penerapan doktrin demokrasi di negara-negara dunia ketiga. Namun pendapat inipun disangkal kebenarannya, teoritisi dependensi menarik kesimpulan yang bertolak belakang. Ketimpangan dan distorsi ekonomi yang terjadi di masyarakat dunia ketiga disebabkan oleh karena adanya ketergantungan pada sistem ekonomi dunia. Hal ini membuat praktek demokratisasi di negara dunia ketiga sulit diwujudkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya sulit sekali untuk merumuskan suatu model yang absolut untuk dapat dijadikan rujukan bagi terjadinya akselerasi untuk pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Prakondisi yang nampaknya kondusif bagi implementasi ideologi demokrasi di suatu negara ternyata di dalamnya juga terdapat hal-hal yang kontra produktif bagi berlakunya iklim demokrasi. Namun demikian pengakuan terhadap pentingnya prakondisi di atas bagi terlaksananya suatu proses demokratisasi di suatu negara bukan suatu hal yang percuma. Setidaknya pemahaman akan prakondisi di atas seperti dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperjuangkan berlangsungnya suasana sistem politik yang demokratis di suatu negara. Namun demikian para aktor politik juga tetap harus kritis untuk memperhatikan prakondisi lain yang terjadi sebelumnya. Pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak dapat lepas dari struktur dan prakondisi yang merupakan hasil pembangunan dan aktifitas elit politik di masa lampau. Oleh karena itu kita harus melihat bahwasanya terlaksananya atau tidak terlaksananya proses demokratisasi di suatu negara dipengaruhi dan ada kaitannya dengan prakondisi ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain, yang terbentuk pada periode sebelumnya dan tentunya itu harus menjadi bahan pertimbangan dan rujukan para elit politik di suatu negara pada saat ini.

**Praktik Akselerasi Demokrasi di Indonesia**

Reformasi tahun 1998 merupakan babak baru dalam dinamika sistem politik di Indonesia, pada tahun itu dimulailah tradisi demokrasi dalam semua proses politik di negara ini. Sistem politik yang terdominasi dan terhegemoni sangat militeristik yang bersifat sentralistik. Sejak saat itu proses politik Indonesia keluar dari jeratan dan pasungan intervensi politik negara yang sangat dominatif. Arus perubahan yang sangat kencang bertiup kencang menyapu praktek otoritarianisme di masa lampau diganti dengan iklim yang segar bagi berseminya tunas-tunas demokrasi di segala bidang kehidupan.

Reformasi politik yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun memberikan manfaat yang besar bagi dinamika sistem politik di Indonesia. Fenomena kebebasan politik ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi terbangunnya suatu tata pemerintahan yang bersih, adil dan berwibawa. Dengan terjadinya proses demokratisasi di Indonesia tentunya diharapkan akan terbentuk suatu negara demokratis yang memiliki kredibilitas tinggi dan terwujudnya suatu masyarakat sipil yang sejahtera. Banyak keuntungan dan kemanfaatan yang diraih sebagai dampak terjadinya gelombang perubahan di Indonesia. Keberhasilan dari arus reformasi ini diantaranya adalah terbentuknya puluhan partai yang digalang oleh aneka kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang ideologi, aspirasi dan tradisi politik yang bervariasi. Demikian pula terjadi liberalisasi media massa yang sangat luas, media sangat leluasa dalam mencari dan menyebarkan informasi pada publik. Rakyat tidak dihalang- halangi ketika hendak menyampaikan aspirasinya. Keterbukaan bagi seluruh elemen masyarakat didalam melontarkan kritik dan saran kepada penguasa di ruang publik.

Hal positif lain yang dicapai dengan adanya reformasi di segala bidang di Indonesia adalah partisipasi sipil meningkat, masyarakat politik tumbuh subur, berbagai upaya pemulihan dan pembangunan ekonomi diselenggarakan, desentralisasi dan otonomi daerah diterapkan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan transparan, kampanye perlindungan HAM semakin marak, reformasi sektor pertahanan dan keamanan menjadi agenda yang diprioritaskan. Tuntutan bagi suatu negara yang demokratis juga berhasil diwujudkan, yaitu terselenggaranya pemilihan umum yang dilandasi semangat penegakkan prinsip keadilan dan kejujuran.

Musim semi demokratisasi di Indonesia terlihat juga pada terjadinya desakralisasi lembaga kepresidenan. Pada masa orde baru yang bercorak absolut, presiden adalah penguasa tunggal dan tidak dapat tersentuh oleh hukum. Tetapi ketika reformasi bergulir presiden dapat ditumbangkan dari tampuk kekuasaannya melalui mekanisme konstitusional oleh rakyat. Ini adalah suatu fenomena kemajuan dalam sistem politik di Indonesia. Hal lain yang dapat menjadi parameter keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia adalah terselenggaranya pilkada dan pemilu langsung dalam pemilihan Kepala Daerah, Anggota Legislatif dan Presiden. Pelaksanaan pemilu adalah merupakan momentum dalam mempertegas arah konsolidasi demokrasi dan penguatan kelembagaan politik. Proses demokratisasi di Indonesia akan menjamin semakin kokohnya sistem demokrasi sosial yang berlanjut (*suistainable constitutional democracy*), dimana hal ini sangat dibutuhkan guna menempatkannya sebagai instrumen efektif yang bekerja bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian reformasi untuk menjalankan roda demokrasi dalam praktek penyelenggaraan negara, masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan. Kelemahan itu diantaranya adalah sektor kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendididkan, kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup dan sebagainya, masih jauh dari apa yang diangankan masyarakat. Pemaksaan kehendak, kekerasan politik, korupsi dan keculasan yang dilakukan aparat legislatif, eksekutif dan yudikatif bukannya semakin menyusut namun menunjukkan eskalasi yang meningkat. Munculnya partai baru seringkali tidak memberikan rasa optimisme pada masyarakat, namun justru menciptakan rasa pesimis, skeptis bahkan sikap sinis. Anggapan yang berkembang pada masyarakat, partai politik hanya akan dijadikan kedok dan kendaraan bagi petualang politik dalam meraih dan mewujudkan hasrat pribadi dan ambisi yang jauh dari upaya menyejahterakan rakyat.

Boleh dikatakan bahwa proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia nampaknya masih sebatas meningkatkan kebebasan politik dan penghargaan atas hak asasi manusia, tetapi belum membawa kepada pembangunan ekonomi yang cepat dan memberdayakan ekonomi rakyat yang bisa mengentaskan dari jerat kemiskinan. Demokratisasi di Indonesia masih direcoki dengan tindakan- tindakan anarkis dan menyulut kekacauan sosial. Hal ini disebabkan karena iklim demokratis yang seharusnya mengedepankan tatanan dan ketertiban serta moralitas dalam berpolitik, namun dalam prakteknya yang terjadi adalah merebaknya fenomena dimana pemimpin dan masyarakat dapat melakukan apapun sesuai dengan yang mereka inginkan dan sistem hukum (aturan) dilecehkan serta tidak dihormati.

Pemilu di Indonesia meskipun secara umum berlangsung kondusif, namun banyak terjadi kelemahan sampai dengan Pilpres dan Pileg tahun 2019 ini. Misalnya (salah satu contoh) terjadinya kesalahan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kacau, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya cacat moral dan politik yang sangat mencederai berlangsungnya proses demokratisasi di Indonesia.

Akselerasi demokratisasi di Indonesia nampaknya masih panjang dan berliku dan masih dibutuhkan upaya-upaya yang konkret di dalam mengimplementasikan konsep demokrasi ini. Adapun upaya-upaya itu diantaranya adalah:

1. Pemahaman nilai-nilai demokrasi secara individual yang mendorong terwujudnya kompetisi, partisipasi dan kebebasan perlu diinternalisasi pada tingkat individual sehingga terwujud tata tertib sosial. Perilaku kompetisi tidak diartikan sebagai perilaku saling memaki, menghujat dan menjatuhkan, partisipasi tidak dimaknai sebagai kemauan yang bebas tanpa batas.
2. Pembentukan masyarakat sipil dan kelembagaan sosial, karena demokrasi mensyaratkan adanya masyarakat sipil yang mandiri yaitu masyarakat yang sadar akan terbentuknya ketertiban sosial tanpa melalui cara- cara kekerasan. Segala persoalan yang timbul dan dihadapi oleh masyarakat harus diselesaikan melalui dialog dan negosiasi dalam rangka mencari solusi tanpa campur tangan kekuasaan negara melalui tangan-tangan aparatnya.
3. Perbaikan kinerja parlemen, yaitu peningkatan kapasitas lembaga legislatif sebagai institusi politik yang mewakili kepentingan masyarakat baik di tingkat lokal, regional dan nasional dirasa sangat mutlak diperlukan. Mereka yang telah terpilih dan duduk di DPR baik pusat, tingkat I dan II seyogyanya tidak lagi sekedar menyuarakan kepentingan kelompoknya tetapi harus menyatu dan menyuarakan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Peningkatan kepekaan pemerintah yang dalam hal ini menegakkan keadilan dan sekaligus mensejahterakan kehidupan segenap lapisan kehidupan segenap lapisan masyarakat yang ada di negara Indonesia. Indikator yang paling komplit adanya pemerintahan yang memiliki kepekaan adalah pemerintahan yang secara aktif mengambil peran dalam pembentukan undang-undang tanpa harus menunggu masalah muncul ke permukaan.

Upaya penyempurnaan proses demokratisasi di Indonesia adalah suatu hal yang masih harus dilakukan. Apabila tidak ada perubahan maka apatisme publik akan semakin menguat, tingkat partisipasi politik semakin melemah dan dampaknya tidak mustahil akan terjadi negara yang gagal tentunya hal ini adalah suatu hal yang tidak kita inginkan dan dengan sekuat tenaga harus dihindari, artinya semua pihak harus arif dalam merespon dinamika yang terjadi.

**Penutup**

Demokrasi adalah konsep politik yang menjadi pilihan sistem politik di berbagai negara dunia ketiga pada dua dasawarsa terakhir. Konsep demokrasi dianggap mampu dan nyata untuk mengatasi masalah sosial politik yang dihadapi berbagai negara. Agar akselerasi praktek demokratisasi dapat ditingkatkan, maka perlu upaya-upaya konkrit yang harus dilakukan, diantaranya adalah penanaman atas pemahaman nilai-nilai demokrasi secara individual ditingkatkan, pembentukan masyarakat sipil dan kelembagaan sosial, perbaikan kinerja parlemen dan peningkatan kepekaan pemerintah. Bangsa Indonesia yang masih dalam taraf belajar berdemokrasi harus selalu belajar dan melakukan pembenahan di segala bidang. Kelemahan yang terjadi selama satu dekade proses reformasi digulirkan sebaiknya terus dikoreksi dan diperbaiki. Dengan cara ini maka praktek demokrasi untuk kesejahteraan rakyat dapat direalisasi dan kegagalan demokrasi dapat dihindari.

**Daftar Bacaan**

Mangun Wijaya, 1994. Dalam Sidney Hook, *Sosok Filsuf Humanisme Demokrasi Dalam Tradisi Pragmatisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

*Gelombang Demokrasi Dunia* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Meyer. T., 2005. *Demokrasi Sosial dan Libertarian*. Jakarta: Friederich Ebert Stiftung.

*Politik Identitas*. Jakarta: Friederich, 2004

Sutrisno, Muji, 2000. *Demokrasi* Semudah *Ucapankah?* Yogyakarta: Penerbit Kanisius